



FALSAFAH PANCASILA DALAM KEPEMIMPINAN NASIONAL: PENGELOLAAN SUMBER DAYA STRATEGIS SEBAGAI ANTITESIS TERHADAP HEGEMONI GLOBAL

Eko Bintara Saktiawan¹, Wasito², Tarsisius Susilo³, Thomas HK Sinaga⁴, Wahyu
Ramadhanus Suryawan⁵

Sekolah Staf dan Komando TNI

Email : ekobintarasaktiawan056@gmail.com, wasi85.111@gmail.com,
muchsus70@gmail.com, apul_au97@yahoo.com, wahyursseskotni@gmail.com

Abstract

This article explores the philosophy of Pancasila as an ethical and strategic foundation for Indonesia's national leadership in managing strategic resources—natural, human, and technological. Amidst the currents of global leadership, which tend to be hegemonic and exploitative as analyzed through the thoughts of Noam Chomsky and Jeffrey Sachs, Pancasila is proposed as an antithesis. This approach is not mere rhetoric but an operational model rooted in the universal humanistic values embedded in Pancasila, as conceptualized by Driyarkara and Karim Suryadi. By integrating classical (Sun Tzu, Plato) to contemporary (Prabowo Subianto) leadership theories, alongside local wisdom such as the "theory of struggle" (teori perjuangan) and "sapalibatisme," this article formulates a leadership model that interprets power as a sacred trust (amanah), rather than an arena for libido dominandi. The analysis is enriched by a practical case study of Eko Bintara Saktiawan's humanist leadership ethos in Puncak Jaya. The result is a synthesis of thought directed towards the Golden Indonesia 2045 Vision through the Asta Cita program, aligned with the Sustainable Development Goals (SDGs), to realize a more just and civilized world order.

Abstrak (Indonesia)

Artikel ini mengupas falsafah Pancasila sebagai landasan etis dan strategis bagi kepemimpinan nasional Indonesia dalam mengelola sumber daya strategis—sumber daya alam, manusia, dan teknologi. Di tengah arus kepemimpinan global yang cenderung hegemonik dan eksploitatif, sebagaimana dianalisis melalui pemikiran Noam Chomsky dan Jeffrey Sachs, Pancasila ditawarkan sebagai sebuah antitesis. Pendekatan ini bukan sekadar retorika, melainkan sebuah model operasional yang berakar pada nilai-nilai universal kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila, seperti yang digagas Driyarkara dan Karim Suryadi. Dengan mengintegrasikan teori kepemimpinan klasik (Sun Tzu, Plato) hingga kontemporer (Prabowo Subianto), serta kearifan lokal seperti teori perjuangan dan sapalibatisme, artikel ini merumuskan model kepemimpinan yang memaknai kekuasaan sebagai amanah, bukan sebagai arena bagi libido dominandi. Analisis diperkaya dengan studi kasus praktis dari etos kepemimpinan humanis Eko Bintara Saktiawan di Puncak Jaya. Hasilnya adalah sebuah sintesis pemikiran yang mengarah pada Visi Indonesia Emas 2045 melalui program Asta Cita, yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), untuk mewujudkan tatanan dunia yang lebih adil dan beradab.

Article History

Submitted: 24 September 2025

Accepted: 27 September 2025

Published: 28 September 2025

Key Words

Pancasila Leadership, Global Hegemony, Strategic Resources, National Security, Theory of Struggle, Asta Cita.

Sejarah Artikel

Submitted: 24 September 2025

Accepted: 27 September 2025

Published: 28 September 2025

Kata Kunci

Kepemimpinan Pancasila, Hegemoni Global, Sumber Daya Strategis, Keamanan Nasional, Teori Perjuangan, Asta Cita.

1. Pendahuluan

Krisis Kepemimpinan Global dan Relevansi Pancasila.

Dinamika geopolitik global kontemporer diwarnai oleh krisis kepemimpinan yang fundamental. Model yang dominan sering kali menampilkan corak hegemonik dan eksploitatif,



di mana kekuasaan dimobilisasi untuk kepentingan nasional yang sempit atau kepentingan elite transnasional. Kritikus seperti Noam Chomsky telah lama membedah mekanisme di balik hegemoni ini melalui konsep *manufacturing consent*. Di sisi ekonomi, Jeffrey Sachs menyoroti kegagalan model kapitalisme neoliberal dalam mendistribusikan kemakmuran. Fenomena ini sejalan dengan temuan riset yang menunjukkan bahwa otonomi daerah, tanpa integritas kepemimpinan dan penguatan regulasi berbasis nilai, berpotensi menjadi alat hegemoni kapitalis di tingkat lokal yang mengabaikan kepentingan publik.¹

Kecenderungan ini merefleksikan pandangan pesimistis tentang sifat dasar manusia, seperti yang diungkapkan oleh Plautus dalam adagiumnya, *homo homini lupus*—manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Namun, Seneca menawarkan antitesis melalui adagium *homo homini socius*, yang menyatakan bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Di persimpangan inilah Pancasila menemukan relevansinya yang mendesak.

Artikel ini berargumen bahwa Pancasila, sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, menawarkan sebuah model kepemimpinan alternatif yang secara sadar memilih jalan *homo homini socius*. Kelahiran Negara Bangsa Indonesia dipicu oleh sebuah kesadaran kolektif dan *nilai kejuangan* yang mengkristal dalam Sumpah Pemuda 1928, jauh sebelum proklamasi kemerdekaan. Ini membuktikan bahwa fondasi negara ini adalah sebuah cita-cita luhur untuk hidup bersama dalam keadilan.

Namun, potensi Pancasila sering terdistorsi oleh penyalahgunaan kekuasaan. Kepemimpinan kerap disalahpahami sebagai hak dan privilese, bukan sebagai *amanah*—sebuah beban suci yang harus dipikul. Ketika kepemimpinan dimaknai sebagai beban, ia memberikan stimulus bagi seorang pemimpin untuk berpikir secara normatif, kritis, dan *radikal*—mencari hingga ke akar (*radix*) persoalan—untuk melahirkan solusi substantif demi tercapainya pelayanan publik dan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, artikel ini akan merumuskan sebuah model kepemimpinan nasional berbasis Pancasila dalam pengelolaan sumber daya strategis (SDA, SDM, teknologi) sebagai sebuah antitesis konkret terhadap hegemoni global.²³

2. Kerangka Teori: Dari Filsafat Klasik hingga Pemikiran Strategis Kontemporer

2.1.1 Grand Theory: Fondasi Filosofis

2.1.1 Filsafat Politik Klasik: Landasan idealisme kepemimpinan diletakkan oleh Plato dan Socrates dengan konsep *philosopher king*. Aristoteles menyempurnakannya dengan konsep negara (polis) yang bertujuan untuk mencapai *eudaimonia* atau kebaikan bersama (*common good*).

2.1.2 Dialektika Sifat Manusia: Pertentangan antara *homo homini lupus* (Plautus) dan *homo homini socius* (Seneca) berfungsi sebagai bingkai untuk memahami pilihan fundamental seorang pemimpin.

2.1.3 Teori Kritis Global: Pemikiran Noam Chomsky dan Jeffrey Sachs menyediakan alat analisis untuk membongkar struktur kekuasaan global yang tidak adil.

2.2 Middle Theory: Konteks Keamanan, Geopolitik, dan Kemanusiaan

2.2.1 Teori Hubungan Internasional & Keamanan: Konsep *security dilemma* menjelaskan bagaimana niat baik suatu negara untuk memperkuat pertahanan dapat dipersepsikan sebagai ancaman oleh negara lain. Pancasila,

¹ <https://jurnal.feb-umi.id/index.php/JER/article/view/1761>

² <https://johnmattone.com/blog/how-critical-thinking-helps-leaders-work-through-problems/>

³ <https://thebasics.guide/radical-thinking/>



dengan prinsip musyawarah mufakat (Sila Keempat), menawarkan pendekatan diplomasi preventif.

2.2.2 Geopolitik dan Keamanan Nasional: Teori geopolitik memandang lokasi dan sumber daya sebagai faktor penentu kekuatan negara. Kepemimpinan Pancasila menuntut pengelolaan aset strategis ini untuk kedaulatan nasional, sejalan dengan konsep ketahanan nasional yang meluas.

2.2.3 Landasan Humaniora dan Hukum: Filsafat humaniora Driyarkara, yang menekankan "memanusiakan manusia", menjadi landasan etis bagi Sila Kedua. Dari sisi hukum, Teori Stufenbau Hans Kelsen memposisikan Pancasila sebagai *Grundnorm* atau norma dasar fundamental.⁴

2.3 Applied Theory: Konkretisasi Ideologi dan Kepemimpinan

2.3.1 Teori tentang Pancasila: Pemikiran Prof. Armaidy Armawi dan Prof. Karim Suryadi menegaskan Pancasila sebagai sistem filsafat yang hidup. Kearifan lokal seperti *Sapalibatisme* dari Prof. Syamsul Maarif menawarkan model implementasi gotong royong dalam konteks modern.

2.3.2 Seni dan Praktik Kepemimpinan:

a. Klasik & Perjuangan: Seni perang Sun Tzu dan kepemimpinan gerilya Panglima Soedirman menunjukkan kekuatan moral dan strategi. Para pendiri bangsa—Soekarno (Trisakti), M. Hatta (ekonomi koperasi), M. Natsir, Haji Agus Salim, dan Tan Malaka—mewariskan teladan kepemimpinan intelektual.

b. Kontemporer: Gagasan "ParadoksIndonesia" dari Prabowo Subianto mengidentifikasi masalah inti bangsa: kekayaan sumber daya yang belum menyejahterakan rakyat. Program Asta Cita 2045 kemudian hadir sebagai peta jalan solutif yang akan direalisasikan melalui APBN untuk mencapai tujuan pembangunan di berbagai sektor.⁵⁶

3. Pembahasan

Merancang Model Kepemimpinan Pancasila sebagai Antitesis.

3.1 Pancasila: Nilai Universal dalam Bingkai Nusantara

Pancasila adalah kristalisasi nilai-nilai kemanusiaan universal yang digali dari bumi Nusantara. Universalitas inilah yang membuat Pancasila mampu menjadi jembatan dialog peradaban dan menawarkan solusi bagi masalah global.

3.2 Dekonstruksi Kepemimpinan Hegemonik vs. Konstruksi Kepemimpinan Amanah

Kepemimpinan hegemonik didasarkan pada *libido dominandi*, sementara kepemimpinan Pancasila berpusat pada konsep *amanah*. Dalam perspektif Islam, kepemimpinan adalah sebuah kepercayaan (*amanah*) dan kontrak psikologis antara pemimpin dan pengikutnya untuk membimbing dan melindungi secara adil. Konsep ini dikembangkan lebih lanjut menjadi *amanah coercive intellectual leadership*, yang

⁴ Firdaus, A., Suhaidib, Sunarmic, Levizad, J. (2023). Pancasila Ideology in Challenges of Globalization on Mineral and Coal Law in Indonesia,

Miami | v.11, n. 11 | pages: 01-23 | e01148 | 2023. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i11>.

⁵ <https://opini.kemenkeu.go.id/article/read/mewujudkan-asta-cita-melalui-apbn-2025>

⁶ <https://tlogopayung.kendalkab.go.id/kegiatan/detail/MIFmQ005NGlhUkZnTUc2eVdKMxRWZz09/asta-cita-pemerintahan-prabowo-gibran.html>



mendefinisikan profesionalisme pemimpin dalam mengontrol dan menstimulasi perilaku pengikut berdasarkan nilai kepercayaan.⁷⁸

3.3 Pengelolaan Sumber Daya Strategis Berbasis Pancasila

Model kepemimpinan Pancasila harus diwujudkan dalam kebijakan pengelolaan tiga sumber daya strategis:

3.3.1 Sumber Daya Alam (SDA): Mengacu pada Sila Kelima dan "Paradoks Indonesia," pengelolaan SDA harus berprinsip pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui hilirisasi industri dan renegotiasi kontrak yang adil.

3.3.2 Sumber Daya Manusia (SDM): Berlandaskan Sila Kedua dan humanisme Driyarkara, pengembangan SDM harus utuh. Sebuah studi menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila melalui *kepemimpinan yang melayani* sangat efektif dalam meningkatkan kinerja sumber daya manusia.⁹

3.3.3 Teknologi: Sesuai Sila Ketiga dan Pertama, pengembangan teknologi harus bertujuan memperkuat persatuan nasional dan dilandasi nilai-nilai etis.

3.4 Sinergi Asta Cita 2045 dan SDGs

Kerangka kerja pembangunan nasional Indonesia, yang tertuang dalam Asta Cita 2045, secara eksplisit menempatkan ideologi Pancasila sebagai pilar utama untuk memperkokoh ketahanan bangsa. Visi ini mengartikulasikan strategi komprehensif yang meliputi modernisasi sistem pertahanan, penciptaan lapangan kerja yang berdaya tahan, serta pembentukan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan berkarakter, seluruhnya selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Konvergensi antara agenda nasional ini dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)* PBB sangat jelas terlihat. Dengan mengedepankan nilai kearifan lokal seperti gotong royong dan keadilan sosial, Indonesia menunjukkan bahwa komitmen global dapat diwujudkan melalui lensa nasionalisme yang bersifat humanis.¹⁰

Studi-studi akademis terkini menguatkan argumen bahwa internalisasi nilai-nilai Pancasila ke dalam kebijakan publik secara signifikan berkontribusi pada efektivitas pencapaian target *SDGs* di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Sartika (2022) menemukan bahwa prinsip-prinsip Pancasila, seperti musyawarah dan penghargaan terhadap keragaman, mendorong pendekatan yang lebih partisipatif dan adil dalam pengelolaan sumber daya. Hal ini terbukti menjadi faktor krusial dalam kemajuan di bidang-bidang vital *SDGs*, termasuk pendidikan, pengentasan kemiskinan, dan pelestarian lingkungan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa program Asta Cita tidak hanya berfungsi untuk menegakkan kedaulatan negara, tetapi juga berperan sebagai instrumen yang mengakselerasi pencapaian tujuan pembangunan global yang berkelanjutan.¹¹¹²

⁷ <https://eprints.uny.ac.id/4969/1/kepemimpinan-amanah.pdf>

⁸ https://repository.unissula.ac.id/31264/1/Doktor%20Ilmu%20Manajemen_10401800010_fullpdf.pdf

⁹ Panahatan, M. B., Supriyadi, D. A., Bayhaki, B., Wibowo, A., & Setyaningrum, R. P. (2021). Penerapan Pancasila Berbasis Kepemimpinan Melayani Terhadap Kinerja Sumber Daya Manusia: Implementation of Pancasila Based on Servant Leadership on Human Resources Performance. *JURNAL EMAS: Ekonomi Manajemen Akuntansi Kewirausahaan*, 1(1), 73 - 86. Retrieved from <https://journal.lppmpelitabangsa.id/index.php/emas/article/view/341>

¹⁰ https://www.setneg.go.id/baca/index/rpjm_n_2025_2029_fondasi_awal_wujudkan_visi_indonesia_emas_2045

¹¹ Sartika, R., Praja, W. N., & Azis, A. (2022). *Sustainable development goals: Recognition of Pancasila education materials in shaping student ethics in the digital era*. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 19(2), 303-309. <https://doi.org/10.21831/jc.v19i2.48285>

¹² <https://mataram.antaranews.com/berita/489312/asta-cita-prabowo-sejalan-dengan-sdgs-pbb>



Lebih lanjut, pilar strategis Asta Cita 2045 juga mencakup inovasi dan teknologi sebagai motor penggerak transformasi menuju ekonomi hijau dan penguatan keamanan siber nasional. Arah kebijakan ini memiliki korelasi langsung dengan agenda SDGs, terutama yang terkait dengan inovasi dan infrastruktur (Goal 9) serta penanganan perubahan iklim (Goal 13). Inisiatif korporasi, seperti komitmen WIKA Beton terhadap dekarbonisasi untuk mendukung target *net zero emission*, menjadi contoh konkret bagaimana strategi nasional dan tanggung jawab global dapat bersinergi untuk mengatasi isu perubahan iklim sembari meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, Asta Cita, yang berlandaskan Pancasila, menawarkan sebuah model unik yang mampu menyelaraskan kepentingan domestik dengan kewajiban internasional, sekaligus memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang progresif dan bertanggung jawab di panggung dunia.¹³¹⁴

4. Studi Kasus Praktis: Etos Kepemimpinan Humanis di Medan Laga

Etos kepemimpinan yang diterapkan oleh Eko Bintara Saktiawan saat memimpin Satgas Yonif MR 412 di Puncak Jaya, Papua (2018-2019) menjadi bukti nyata. Kalimat etosnya, "Kita Bersaudara, Bersama Tuhan, Menjaga NKRI Dengan Hati," adalah terjemahan langsung dari nilai-nilai Pancasila. Etos ini di-breakdown menjadi lima pilar aksi, termasuk *memanusiakan manusia* dan *bekerja dengan hati*.¹⁵ Kalimat etos tersebut diyakini oleh *author* sebagai panduan praktis yang bernilai universal, yang berarti menembusi ruang dan waktu, karena membela kepentingan kemanusiaan atau sedang menjaga harkat dan martabat manusia. Pendekatan ini sejalan dengan penelitian di Puncak Jaya yang menekankan pentingnya pejabat pimpinan tinggi untuk menerapkan nilai-nilai inti BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) yang berlandaskan kearifan lokal untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang baik.¹⁶

Keberpijakan pada nilai kemanusiaan/humaniora, menjadi krusial dalam aksi-aksi menyikapi seluruh persoalan kehidupan manusia. Sebagaimana difahami bersama, manusia adalah tokoh sentral dalam dinamika kehidupan, maka rekomendasi terbaik dalam *problem solving* adalah berfokus pada mewartakan kepentingan seluruh umat manusia, sembari dengan secara maksimum menjamin tidak ada satu individu pun yang mengalami kerugian-kerugian.

5. Sintesis dan Refleksi Kritis: Kejuangan, Keseriusan, dan Pemikiran Radikal.

Kontribusi baru dari artikel ini terletak pada sintesis beberapa gagasan kritis:

5.1 Makna Kejuangan dan Ganjaran Ilahi: Kejuangan /*ke·ju·ang·an/*n perihal berjuang; berhubungan dengan urusan berjuang.¹⁷ Dalam berkehidupan di dunia, manusia senantiasa melakukan perjuangan yang bermodalkan motivasi kejuangan dalam menggapai tujuan-tujuannya. Setiap individu dan organisasi memiliki tujuan-tujuan yang kemudian ditentukan konsep-konsep cara penggapaiannya.

¹³ <https://www.wika-beton.co.id/berita/dukung-sdgs-dan-program-asta-cita-melalui-dekarbonisasi/>

¹⁴ https://www.setneg.go.id/baca/index/rpjm_n_2025_2029_fondasi_awal_wujudkan_visi_indonesia_emas_2045

¹⁵ Saktiawan, Eko Bintara. "Merdeka Menjadi Manusia" dalam Iin Sulastri Ode Ami, dkk (ed.), Spirit Dari Timur Untuk Merah Putih (Yogyakarta: Terakata, 2024)

¹⁶ H. Tumiran, Akbar Silo, Yosephina Ohoiwutun, Vince Tebay (2023). Implementation of ASN Core Values BerAKHLAK for Pratama High Leadership Officials in Puncak Jaya Regency, Papua Province. Formosa Journal of Science and Technology (FJST) Vol.2, No.11, 2023: 2989-3002. Retrieved from

<https://journal.formosapublisher.org/index.php/fjst/article/download/6968/6896/24878>

¹⁷ <https://kbbi.web.id/juang>



Perjuangan manusia sangat erat dengan teori hirarki Maslow, sejak fisiologis hingga aktualisasi diri. Perjuangan manusia tak lain dan tak bukan adalah demi memenuhi kebutuhannya. Berbagai kebutuhan manusia diperjuangkan untuk dipenuhi. Kegagalan mencapai tujuan seringkali menggoyahkan pendirian manusia, yang ini merupakan indikator lemahnya energi kejuangan. Hingga di sini, menjadi sangat urgen untuk memahami nilai bahwa Tuhan tidak menuntut hasil yang sempurna 100%, melainkan menilai *kadar perjuangan dan kejuangan*.¹⁸ Para pahlawan yang gugur sebelum kemerdekaan pada 1945 tidaklah gagal dalam berjuang; mereka telah menunaikan perjuangannya secara maksimum (menemui ajal), eksistensi perjuangan dan kejuangannya memberikan arti bagi penerusnya, juga bagi dirinya sendiri (derajat kemuliaan).

5.2 Keseriusan Peran dan Pemikiran Radikal-Kritis: Persoalan timbul diyakini karena manusia dalam sistem kehidupan tidak serius menjalankan perannya.¹⁹ Betapa seorang pemimpin yang tidak serius menjalankan perannya dalam kepemimpinan di organisasi, akan menghadirkan poin kontraproduktif (mekanisme organisasi tidak berjalan normatif, tujuan organisasi tidak tercapai). Seorang pemimpin yang berfalsafah Pancasila, diyakini dapat memutus siklus ini dengan mendorong budaya keseriusan dalam menjalankan setiap peran yang dimiliki oleh individu-individu. Menyikapi persoalan dalam dinamika kehidupan, memerlukan cara berpikir yang *kritis* dan *radikal*, dengan penjelasan sebagai berikut :

5.2.1 Berpikir Kritis adalah kemampuan untuk berpikir rasional dan logis tanpa bias untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan yang tepat. Ini adalah keterampilan kepemimpinan yang vital untuk membuat penilaian yang sehat dan mengantisipasi hasil.²⁰²¹ Berpikir kritis merupakan pola berpikir yang senantiasa terdorong untuk mencari kebenaran. Seseorang yang berpikir kritis, tidak akan berhenti mencari kebenaran, meskipun kebenaran yang absolut adalah Tuhan Yang Maha Kuasa. Persoalan yang timbul di kehidupan manusia merupakan hasil dari ketidakbenaran, sehingga tepatlah dalam menyikapinya adalah dengan memelihara cara berpikir yang kritis.

5.2.2 Berpikir Radikal berasal dari kata Latin *radix* yang berarti "akar". Ini bukan tentang ekstremisme, melainkan proses refleksi mendalam untuk mempertanyakan dan memahami akar permasalahan, sehingga solusi yang dihadirkan bersifat fundamental, bukan sekadar perbaikan di permukaan.²³²⁴²⁵ Berpikir radikal dapat menuntun manusia untuk menemukan hal-hal prinsip. Kepemilikan berpikir radikal sangat tepat untuk menyelesaikan persoalan yang timbul, sebab akan dapat menemukan akar masalah, sehingga dapat menghadirkan solusi yang paling tepat menjawab persoalan.

¹⁸ https://youtu.be/84LWLAQuDws?si=Rt-tcwq4Prd_YS6P

¹⁹ https://youtu.be/J_ciLQsmzZ0?si=8yflgowRv8e2wI2U

²⁰ <https://www.academyleadership.com/news/201102.asp>

²¹ <https://www.alternativepartnership.co.uk/the-logical-leader-why-critical-thinking-is-an-essential-management-skill/>

²² <https://johnmattone.com/blog/how-critical-thinking-helps-leaders-work-through-problems/>

²³ <https://thebasics.guide/radical-thinking/>

²⁴ <https://radical-edu.com/index.php/en/about/radical-thinking>

²⁵ <https://www.ivy.com/learning-modules/radical-thinking-how-to-see-the-bigger-picture-with-peter-lamont-1>



6. Kesimpulan

Artikel ini menegaskan bahwa Falsafah Pancasila bukanlah sekadar artefak sejarah atau slogan politik, melainkan sebuah sistem operasi kepemimpinan yang dinamis, canggih, dan relevan untuk menjawab tantangan zaman. Analisis interdisipliner yang mengawinkan filsafat politik klasik, teori kritis, studi keamanan, dan kearifan lokal membuktikan bahwa Pancasila menawarkan sebuah antitesis yang kuat dan kredibel terhadap model kepemimpinan global yang cenderung hegemonik dan eksploitatif. Dengan memaknai kepemimpinan sebagai amanah yang menuntut pemikiran kritis dan radikal, mengelola sumber daya strategis untuk keadilan sosial, dan melandasi setiap tindakan dengan etos humanisme dan spiritualitas, model kepemimpinan Pancasila menunjukkan superioritasnya secara etis dan strategis.

Implikasi dari temuan ini bersifat teoretis dan praktis. Secara teoretis, artikel ini menyumbangkan sebuah model kepemimpinan alternatif yang dapat memperkaya literatur studi kepemimpinan dan hubungan internasional. Secara praktis, sinergi antara model kepemimpinan ini dengan program konkret seperti Asta Cita dan relevansinya yang teruji dalam studi kasus di Puncak Jaya, menawarkan sebuah peta jalan yang jelas bagi Indonesia untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Rekomendasi ke depan adalah perlunya internalisasi model kepemimpinan ini dalam kurikulum pendidikan kepemimpinan di semua level, baik sipil maupun militer, serta pengembangan metrik yang terukur untuk mengevaluasi implementasi kepemimpinan berbasis Pancasila dalam tata kelola pemerintahan dan korporasi. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya membangun ketahanan nasional, tetapi juga secara aktif berkontribusi dalam membentuk tatanan dunia yang lebih adil dan beradab.

Daftar Pustaka

- Amirin, T. M. (n.d.). *Kepemimpinan yang Amanah*. Universitas Negeri Yogyakarta. <http://eprints.uny.ac.id/4969/1/kepemimpinan-amanah.pdf>
- Aristotle. (n.d.). *Politics*. (B. Jowett, Trans.). The Internet Classics Archive.
- Chomsky, N., & Herman, E. S. (1988). *Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media*. Pantheon Books.
- Driyarkara, N. (2006). *Karya Lengkap Driyarkara: Esai-esai Filsafat Pemikir yang Terlibat Penuh dalam Perjuangan Bangsanya*. Gramedia Pustaka Utama.
- Firdaus, A. (2023). Pancasila Ideology in Challenges of Globalization in The Perspective of The Mining Legal System. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(10), e1148. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i10.1148>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024, Desember 14). *Mewujudkan Asta Cita Melalui APBN 2025*. Opini Kemenkeu. <https://opini.kemenkeu.go.id/article/read/mewujudkan-asta-cita-melalui-apbn-2025>
- Mattone, J. (2025, August 28). *How Critical Thinking Helps Leaders Work Through Problems*. John Mattone. <https://johnmattone.com/blog/how-critical-thinking-helps-leaders-work-through-problems/>
- Panahatan, M. B. (2021). Penerapan Pancasila Berbasis Kepemimpinan Melayani Terhadap Kinerja Sumber Daya Manusia. *JURNAL EMAS: Ekonomi Manajemen Akuntansi Kewirausahaan*, 1(1), 73-86. <https://journal.lppmpelitabangsa.id/index.php/emas/article/view/341>
- Plato. (n.d.). *The Republic*. (B. Jowett, Trans.). The Internet Classics Archive.



- Pratiwi, R. (2023). *Antesenden dan Konsekuen Amanah Coercive Intellectual Leadership*. [Disertasi Doktoral, Universitas Islam Sultan Agung]. <http://repository.unissula.ac.id/31264/>
- Radical Guide. (n.d.). *The Roots and Evolution of Radical Thought*. <https://www.radical-guide.com/a-guide-for-radicals/what-is-radicalism/the-roots-and-evolution-of-radical-thought/>
- Radical-Edu. (n.d.). *Radical Thinking*. <https://radical-edu.com/index.php/en/about/radical-thinking>
- Sachs, J. D. (2005). *The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time*. Penguin Press.
- Soekarno. (1963). *Di Bawah Bendera Revolusi*. Panitya Penerbit Dibawah Bendera Revolusi.
- Subianto, P. (2014). *Paradoks Indonesia*. PT. Koperasi Garudayaksa Nusantara.
- Sumarna, A. (2023). Regional Autonomy from the Perspective of Capitalist Management. *Journal of Economic, Business and Administration (JEBA)*, 4(2), 177–188. <https://jurnal.feb-umi.id/index.php/JER/article/view/1761>
- Sun Tzu. (2005). *The Art of War*. (L. Giles, Trans.). Tuttle Publishing.
- The Alternative Partnership. (2024, January 3). *The Logical Leader: Why Critical Thinking is an Essential Management Skill*. <https://www.alternativepartnership.co.uk/the-logical-leader-why-critical-thinking-is-an-essential-management-skill/>
- The Basics Guide. (n.d.). *Radical Thinking*. <https://thebasics.guide/radical-thinking/>
- Tlogopayung Kendal. (2024, November 8). *Asta Cita Pemerintahan Prabowo Gibran*. <https://tlogopayung.kendalkab.go.id/kegiatan/detail/MIFmQ005NGlhUkZnTUc2eVdKMxRWZz09/asta-cita-pemerintahan-prabowo-gibran.html>
- Tumiran, H., Silo, A., Ohoiwutun, Y., & Tebay, V. (2023). Implementation of ASN Core Values BerAKHLAK for Pratama High Leadership Officials in Puncak Jaya Regency, Papua Province. *Formosa Journal of Science and Technology (FJST)*, 2(11), 2989-3002. <https://journal.formosapublisher.org/index.php/fjst/article/view/6968>
- United Nations. (n.d.). *The 17 Goals*. Sustainable Development Goals. Diakses pada 27 September 2025.
- Zeitchik, S. (n.d.). *Radical Thinking: How to See the Bigger Picture with Peter Lamont*. IVY. <https://www.ivy.com/learning-modules/radical-thinking-how-to-see-the-bigger-picture-with-peter-lamont-1>
- Saktiawan, Eko Bintara. "Merdeka Menjadi Manusia" dalam In Sulastris Ode Ami, dkk (ed.), *Spirit Dari Timur Untuk Merah Putih* (Yogyakarta: Terakata, 2024). h. 130